



Profitability Ratio of Islamic Rural Banks in Banten Region Post Covid-19 Pandemic

**Khairul Umami¹, Januariansyah Arfaizar^{2*}, Anton Priyo Nugroho³,
Nurulhuda Madjamang⁴**

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ²STAI Yogyakarta - Mahasiswa Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta, ³Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ⁴Muslim Suksa School, Satun province, Thailand

*Corresponding Author: janiariansyaharfaizar@gmail.com

Abstract

This study evaluates the profitability ratios of Sharia Rural Banks (BPR Syariah) in the Banten region after the Covid-19 pandemic. Profitability is a ratio used by authorities to assess a bank's ability to generate income. The Covid-19 pandemic negatively impacted various economic sectors, including banking, which relies heavily on channeling funds to these sectors. This research uses a quantitative descriptive approach and total sampling, involving the entire population of BPR Syariah in the Banten region, with secondary data sourced from the Financial Services Authority (OJK) for the 2023 period. The study's results show that the profitability levels of eight Sharia Rural Banks in Banten fall into the adequately sufficient category (average rating of 3). Core earnings remain the primary income source, while non-core earnings also play a significant role. Profitability performance supports capital stability and indicates positive prospects for the future.

Keywords:

Profitability; BPRS; Health Level, Banten; Covid-19

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi rasio rentabilitas BPR Syariah di wilayah Banten pasca pandemi Covid-19. Rentabilitas adalah rasio yang digunakan otoritas untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan yang sangat bergantung pada penyaluran dana kepada sektor-sektor tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan total sampling, melibatkan seluruh populasi BPR Syariah di wilayah Banten, dengan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rentabilitas dari delapan BPR Syariah di Banten berada pada kategori cukup memadai (rata-rata peringkat 3). Core earnings masih menjadi sumber utama pendapatan, sementara noncore earnings juga berperan signifikan. Kinerja laba mendukung stabilitas permodalan dan menunjukkan prospek yang positif untuk masa depan.

Kata Kunci:

Rentabilitas; Tingkat Kesehatan BPR Syariah; BPR Syariah Wilayah Banten

How to cite:

Umami, K., Arfaizar, J., Nugroho, A. P., Madjamang, N. (2024). Rasio Rentabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Wilayah Banten Pasca Pandemic Covid-19. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 4(2), 188–204. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i2.19030>

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh penyebaran virus SARS-CoV-2 berdampak luas pada hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk lembaga keuangan dan perbankan. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang tentu saja turut terdampak oleh pandemi ini. Dalam situasi pandemi, masyarakat baik sebagai penyedia dana maupun penerima pembiayaan mengalami gangguan finansial. Dari sisi penyedia dana, hal ini dapat memicu penarikan dana pihak ketiga (seperti tabungan, giro, dan deposito), yang berpotensi mengganggu likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan penyaluran dana.

Sementara dari sisi penerima dana (nasabah pembiayaan), pandemi dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan bank serta memengaruhi kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan bank. Tiono & Djajang (2021) menunjukkan adanya perbedaan kinerja perbankan sebelum dan sesudah pandemi, yang terlihat dari perubahan rasio NPL, ROA, dan LDR. Hal yang sama juga ditemukan oleh Kadir & Rahman (2021) yang menemukan terjadi perbedaan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebelum dan sesudah Covid-19. Senada dengan hal tersebut, Rudy & Endang (2021) juga mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas profitabilitas pada BPR.

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Arfaizar et al., 2024). Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak baik pemegang saham, pengurus, karyawan bank itu sendiri, masyarakat umum ataupun lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Selain itu, bank yang sehat tentunya akan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, menjaga kepercayaan masyarakat serta dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran (Arfaizar et al., 2024).

Rentabilitas merupakan salah satu rasio penting yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19, karena pendapatan utama BPRS berasal dari pembiayaan yang disalurkan. Dimana pembiayaan tersebut mengalami penurunan signifikan selama pandemi. Rentabilitas juga menjadi salah satu indikator utama yang digunakan oleh otoritas untuk menilai tingkat kesehatan sebuah BPRS. Kondisi rentabilitas BPRS pasca perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi oleh pemerintah pada 21 Juni 2023 menjadi pertanyaan penting, terutama dengan adanya kebijakan baru pada Maret 2022 yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang berlaku untuk laporan posisi desember 2023. Aturan baru ini merupakan pembaruan yang otomatis mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 20/POJK.03/2019 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Provinsi Banten, sebagai wilayah penyangga ibu kota, memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena kehadiran pelabuhan Merak dan Bojonegara, yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Jakarta. Berdasarkan data demografi, sekitar 94,83% populasi di Banten beragama Islam, menjadikan daerah ini signifikan dalam konteks studi ekonomi Islam. Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi dan menganalisis rasio rentabilitas BPRS di Wilayah Banten pasca pandemi Covid-19.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum secara spesifik membahas performa rentabilitas BPRS di wilayah Banten pasca pandemi, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyoroti kinerja keuangan BPRS dalam konteks pemulihan ekonomi setelah krisis kesehatan global. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan yang relevan bagi para pemangku kepentingan, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun pemerintah daerah, dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi yang lebih adaptif terhadap tantangan pasca pandemi.

2. Literatur Review

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan Nasional (Arifin, 2009). Sepuluh tahun berselang kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 21 yang lebih spesifik memuat ketentuan tentang Bank Syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. pada ayat berikutnya (ayat 9) diterangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Melalui Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diubah nomenklaturnya menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan peraturan (PBI) pada tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia tersebut disempurnakan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 POJK. 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik PBI maupun POJK mengatur berbagai syarat dan prasyarat termasuk ketentuan-ketentuan terkait Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar tercipta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Status Bank Pembiayaan Rakyat secara hukum pertama kali diakui pada tanggal 27 Oktober 1988, “sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan”, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdirinya beberapa koperasi yang menjalankan prinsip syariah dan Baitul Mall wat Tamwil (BMT) seperti Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang lahir pada tahun 1980an (Cahyo, 2018) Lebih jelasnya

keberadaan lembaga keuangan tersebut mempertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada di tingkat nasional.

Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS). Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) tersebut adalah: PT. BPR Dana Marhatillah yang berdomisili di Kecamatan Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, yang berdomisili di Kecamatan Padalarang, Bandung, dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, yang berdomisili di Kecamatan Banjaran, Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR syariah tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan technical assistance dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Marhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI.

Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tingkat Kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS. Penilaian kuantitatif yang dilakukan adalah terhadap faktor permodalan dan faktor rentabilitas, sedangkan penilaian kualitatif meliputi penilaian terhadap tata kelola dan profil risiko. Lebih detil terkait apa saja yang menjadi cakupan faktor penilai tingkat kesehatan BPRS dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 POJK nomor 03/POJK.03/2022 Tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

Di Indonesia ketentuan yang mengatur Tingkat kesehatan BPR dan BPRS Syariah sebelumnya merujuk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tahun 1997 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/17/PBI/2007 (Press BI, 2012), kemudian setelah dibentuk OJK sebagai lembaga otoritas yang mengawasi kinerja Bank dibentuklah aturan mengenai tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK 20 ini lebih spesifik hanya terkait BPRS dan biasa dikenal dengan istilah analisa CAMEL dikarenakan memang penilaiannya mencakup 5 rasio keuangan yakni Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*) dan Likuiditas (*Liquidity*) kemudian berselang 2 tahun OJK menerbitkan kembali aturan baru bagi BPR Syariah yang dengan terbitnya aturan baru ini menafikan 2 (dua) aturan tersebut diatas, adapun aturan baru tersebut yakni POJK nomor 03/POJK.03/2022 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, aturan yang terakhir ini dikenal dengan istilah RBBR (*Risk Based Bank Rating*) karena memang lebih menitik beratkan pada profil risiko dalam melakukan penilaian kesehatan Bank, adapun yang menjadi cakupan penilaian pada POJK nomor 03 tahun 2022 adalah penilaian terhadap Profil Risiko (*risk profil*), Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*).

Penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan sendiri oleh Bank secara lengkap dan benar sesuai dengan aturan dalam POJK, penilaiannya dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember setiap tahunnya dengan ketentuan pelaporan paling lambat 31 Juli untuk laporan bulan juni dan 31 Januari untuk laporan bulan Desember, meski penilaian tingkat kesehatan dilakukan sendiri atau secara mandiri oleh Bank yang bersangkutan namun OJK dapat meminta Bank untuk melakukan pengkinian atau perubahan apabila terdapat ketidak sesuaian.

Tabel 1. Regulasi Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Regulator	Tahun	Ketentuan
Bank Indonesia	1997	“Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.”
Bank Indonesia	2007	“Peraturan Bank Indonesia nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.”
Otoritas Jasa Keuangan	2019	“Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”
Otoritas Jasa Keuangan	2022	“Peraturan OJK nomor 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank pembiayaan rakyat syariah.”

Rasio Rentabilitas

Rasio merupakan metode yang digunakan dalam menginterpretasikan sebuah laporan keuangan dengan menjelaskan korelasi antara data-data finansial (Firdaus et al., 2021), Menurut Thamrin secara sederhana rasio disebut perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya dalam suatu perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang sama untuk mengetahui keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan (Thamrin, 2021).

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan. Menurut kasmir rentabilitas adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam meningkatkan keuntungan dengan menganalisa rasio laba terhadap total aset (ROA) dan perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (Kasmir, 2018), Penilaian terhadap rasio rentabilitas merupakan penilaian kuantitatif berdasarkan angka-angka, Penilaian ini meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan tingkat efisiensi operasional, untuk mengukur kedua komponen diatas berdasarkan POJK nomor 03/POJK.03/2022 dapat menggunakan tiga rasio yaitu rasio Return on Aset (ROA), Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Rasio Net Imbalan (NI) atau Net Interest Margin (NIM), ketiga rasio ini merupakan penyempurna dari faktor penilai sebelumnya yakni POJK Nomor 20/POJK.03/2019 yang hanya menitik beratkan pada rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai faktor utama penilaian.

a. Rasio Return on Aset (ROA)

Rasio ROA merupakan hasil dari laba sebelum pajak (*return*) yang disetahunkan dibagi rata-rata total aset dari hasil akumulasi laba awal tahun hingga posisi bulan laporan, untuk laporan bulan juni berarti akumulasi laba sebelum pajak bulan juni dibagi 6 (enam) dan dikali 12 (dua belas) sedangkan untuk asetnya dihitung dengan menjumlahkan total aset sejak januari sampai dengan juni kemudian dibagi 6 (enam) dan dikalikan 12 (dua belas).

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Frianto, 2012). Rasio BOPO merupakan hasil dari perhitungan beban operasional yang disetahunkan dibagi dengan pendapatan operasional yang disetahunkan, untuk laporan bulan juni berarti akumulasi beban operasional bulan juni dibagi 6 (enam) dan dikali 12 (dua belas) sedangkan untuk pendapatan operasionalnya dihitung dengan menjumlahkan total aset sejak januari sampai dengan juni kemudian dibagi 6 (enam) dan dikali 12 (dua belas). Beban Operasional adalah beban bagi hasil untuk pemilik dana (DPK) dan beban operasional bank seperti biaya kegiatan, gaji karyawan, biaya CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) dan lain-lain. Sedangkan pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan lainnya seperti pendapatan administrasi, *fee* PPOB (*payment point online Bank*) dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyaluran dana. rasio ini dapat digunakan untuk menganalisis keadaan kinerja bank dengan menentukan kemampuan perusahaan untuk menciptakan pendapatan operasional yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional bank (Wirnawati & Diyani, 2019).

$$\text{Rumus BOPO} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$$

c. Rasio Net Imbalan (NI)

Rasio Net Imbalan atau Net Interest Margin adalah merupakan hasil dari penjumlahan pendapatan penyaluran dana dibagi rata-rata aset produktif, untuk laporan bulan juni berarti akumulasi beban operasional bulan juni dibagi 6 (enam) dan dikali 12 (dua belas) sedangkan untuk pendapatan operasionalnya dihitung dengan menjumlahkan total aset sejak januari sampai dengan juni kemudian dibagi 6 (enam) dan dikali 12 (dua belas). Pendapatan penyaluran dana adalah pendapatan atas penyaluran dana yang disetahunkan dikurangi beban bagi hasil, imbalan dan bonus yang disetahunkan sedangkan aset produktif adalah total penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan pembiayaan yang salurkan.

$$\text{Rumus NI} = \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana}}{\text{Rata-rata total aset produktif}}$$

3. Method

Penelitian ini peneliti menganalisis data numerik atau angka-angka atau biasa disebut dengan penelitian kuantitatif, dengan membandingkan situasi atau keadaan yang terjadi melalui pendekatan pengolahan data (Suryani, 2015). Data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua dalam hal ini data telah diolah oleh BPRS yang menjadi objek penelitian dimana data tersebut merupakan hasil dari laporan BPRS kepada OJK yang diupload melalui APOLO (aplikasi pelaporan online OJK), sedangkan sumber data penelitian diperoleh dari laporan publikasi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di laman resmi milik OJK. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah Teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang (Sugiyono, 2016).

Metode analisis menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yang bersifat ekspos-fakto artinya penelitian bertujuan mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung (Burhan, 2010), dan dianalisa dilakukan setelah peristiwa terjadi dengan format deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan

berbagai kondisi, situasi atau variable yang timbul atas rasio rentabilitas BPR Syariah wilayah Banten pasca pandemi Covid-19. Rasio keuangan terkait rentabilitas dianalisa menggunakan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terbaru tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK No. 3/POJK.03//2022).

Langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan rasio rentabilitas yakni ROA, BOPO dan NI (Return on Aset, Biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan net imbalan), data tersebut diperoleh dari laman resmi milik OJK kemudian memberikan nilai peringkat akhir dengan cara menjumlah nilai peringkat kemudian dibagi 3 (tiga) atau nilai rata-rata. Ketentuan nilai peringkat merujuk pada lampiran Surat Edaran OJK nomor 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK nomor 03/POJK.03/2022, adapun sistem penilaian peringkatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sistem Penilaian Rasio Rentabilitas

No	Rasio	Nilai
1	ROA (Return On Asset)	Peringkat 1: $ROA \geq 2\%$ Peringkat 2: $1.5\% \leq ROA < 2\%$ Peringkat 3: $1\% \leq ROA < 1.5\%$ Peringkat 4: $0.5\% \leq ROA < 1\%$ Peringkat 5: $ROA < 0.5\%$
2	BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)	Peringkat 1: $BOPO \leq 85\%$ Peringkat 2: $85\% < BOPO \leq 90\%$ Peringkat 3: $90\% < BOPO \leq 95\%$ Peringkat 4: $95\% < BOPO \leq 100\%$ Peringkat 5: $BOPO > 100\%$
3	NI (Net Imbalan)	Peringkat 1: $NI \geq 10\%$ Peringkat 2: $8\% \leq NI < 10\%$ Peringkat 3: $6\% \leq NI < 8\%$ Peringkat 4: $4\% \leq NI < 6\%$ Peringkat 5: $NI < 4\%$

4. Hasil dan Pembahasan Rentabilitas BPRS Attaqwa

BPR Syariah Attaqwa berkantor pusat di Kabupaten Tangerang, tepatnya berlokasi di Ruko Pasar Modern Mutiara Karawaci, Blok D No. 17-18, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bank ini berdiri sejak tahun 1994 dan telah mengalami perkembangan signifikan dalam pengelolaan asetnya, dengan total aset mencapai Rp 85,5 miliar pada laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Tabel 3. Rasio Rentabilitas BPRS Attaqwa

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	0.27	5	2
BOPO	58.14	1	
NI	80.46	1	

Dari data yang disajikan dalam Tabel 3, dapat dilihat beberapa indikator utama rasio rentabilitas BPRS Attaqwa. *Pertama, Return on Assets (ROA)*: BPRS Attaqwa memiliki nilai ROA sebesar 0,27. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, BPRS ini mendapatkan peringkat 5 untuk indikator ROA,

dengan nilai akhir 2. Artinya, BPRS Attaqwa dinilai cukup memadai dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dikelolanya. *Kedua*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): Nilai BOPO sebesar 58,14 menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi dalam pengelolaan biaya operasional. Nilai BOPO yang rendah ini menunjukkan bahwa BPRS Attaqwa mampu mengoptimalkan pengeluaran biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan, yang turut mendukung peringkatnya dengan nilai tertinggi pada indikator ini. *Ketiga*, *Net Income* (NI) atau Rasio Laba Bersih: Pada indikator NI, BPRS Attaqwa memperoleh nilai 80,46, yang juga menempatkannya pada peringkat terbaik. Hal ini mengindikasikan kemampuan BPRS Attaqwa dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional utama yang stabil.

Secara keseluruhan, BPRS Attaqwa memperoleh peringkat akhir kedua dalam aspek rentabilitas, yang artinya bank ini dianggap memadai dalam menghasilkan laba yang mendukung pertumbuhan permodalan. Ini menunjukkan bahwa BPRS Attaqwa telah memenuhi sebagian besar karakteristik kinerja rentabilitas yang diperlukan untuk mencapai kestabilan finansial dan ekspansi. Sumber utama rentabilitas berasal dari *core earnings* atau pendapatan utama yang stabil, yang menandakan bahwa BPRS Attaqwa memiliki prospek laba dan potensi untuk meningkatkan permodalan di masa depan. Rentabilitas yang tinggi ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi keberlanjutan operasional BPRS Attaqwa, tetapi juga sebagai kontribusi dalam peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat sekitar yang dilayaninya.

Rentabilitas BPRS Berkah Ramadhan

BPR Syariah Berkah Ramadhan memiliki kantor pusat di Kabupaten Tangerang, terletak di Komplek Islamic Village Jl. Islamic Raya No.1, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Provinsi Banten. Berdasarkan laporan keuangan pada 31 Desember 2023, BPRS ini memiliki total aset sebesar Rp 73,5 miliar. Dalam analisis kinerja rentabilitas, BPRS Berkah Ramadhan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Rentabilitas BPRS Berkah Ramadhan

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	-2.30	5	5
BOPO	134.32	5	
NI	3.58	5	

Penilaian rentabilitas menunjukkan bahwa BPRS Berkah Ramadhan memperoleh nilai akhir peringkat 5, yang menandakan kategori rentabilitas yang “tidak memadai.” Secara rinci, peringkat ini menggambarkan bahwa laba yang diperoleh belum memenuhi target yang diharapkan serta tidak stabil, sehingga kinerja laba tidak dapat diandalkan untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan peningkatan kinerja laba agar bank dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Kinerja yang kurang memadai ini menandakan bahwa BPRS Berkah Ramadhan mengalami beberapa tantangan utama, di antaranya kerugian signifikan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan rentabilitas berasal dari sumber penghasilan non-inti (*noncore earnings*) yang berisiko tinggi. Hal ini berbeda dengan penghasilan inti (*core earnings*), yang idealnya menjadi sumber utama stabilitas keuangan. Ketidakstabilan penghasilan inti ini menunjukkan bahwa bank belum berhasil mencapai pendapatan yang konsisten dari operasional utama. Dampak dari kerugian ini berpotensi menurunkan permodalan bank di masa mendatang, yang dapat berdampak pada kemampuan BPRS Berkah Ramadhan untuk menjaga keseimbangan dan memenuhi kewajiban operasional serta regulasi di sektor perbankan syariah.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan menghindari kerugian lebih lanjut yang bisa mempengaruhi tingkat permodalan. BPRS Berkah Ramadhan perlu merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan *core*

earnings dan memperbaiki rasio operasional, termasuk efisiensi biaya, agar dapat mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil dan sehat.

Rentabilitas BPRS Cilegon Mandiri (BPRS CM)

BPR Syariah Cilegon Mandiri adalah institusi perbankan syariah yang berkantor pusat di Kota Cilegon, tepatnya berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Komplek Sukma Jaya Kavling 5, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdiri pada tahun 2023, BPRS Cilegon Mandiri berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp 150,4 miliar per laporan neraca pada 31 Desember 2023. Berdasarkan data rentabilitas dalam Tabel 5 berikut, kinerja keuangan BPRS Cilegon Mandiri tercermin dalam tiga indikator utama:

Tabel 5. Rasio Rentabilitas BPRS Cilegon Mandiri

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	-3.11	5	5
BOPO	137.09	5	
NI	4.52	4	

Dengan nilai akhir peringkat 5, BPRS Cilegon Mandiri masuk dalam kategori rentabilitas “tidak memadai.” Peringkat ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh bank belum mencapai target yang diharapkan dan belum cukup stabil untuk menopang operasional jangka panjang. Penilaian ini juga mengindikasikan adanya kerugian yang cukup signifikan pada kinerja keuangan bank, yang disebabkan oleh beberapa faktor mendasar.

Secara khusus, kinerja bank menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan yang berkontribusi pada rentabilitas berasal dari sumber penghasilan non-inti (*non-core earnings*), yang cenderung tidak stabil dan berisiko lebih tinggi. Idealnya, stabilitas keuangan bank seharusnya ditopang oleh pendapatan inti (*core earnings*) yang berasal dari aktivitas operasional utama, seperti pembiayaan dan investasi syariah. Ketidakmampuan bank untuk mempertahankan *core earnings* yang stabil menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola portofolio pembiayaan syariah secara efisien, yang berdampak pada rendahnya laba bersih serta kestabilan keuangan secara keseluruhan.

Rasio BOPO yang mencapai 137,09 menunjukkan bahwa biaya operasional masih terlalu tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang diperoleh. Tingginya rasio ini mengindikasikan rendahnya efisiensi dalam pengelolaan biaya, yang berkontribusi pada rendahnya laba bersih serta penurunan ROA, yang tercatat negatif (-3.11). Nilai ROA negatif ini menunjukkan bahwa BPRS Cilegon Mandiri belum mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba yang memadai, menandakan adanya tantangan besar dalam profitabilitas perusahaan.

Secara keseluruhan kinerja keuangan ini menandakan adanya kebutuhan mendesak bagi BPRS Cilegon Mandiri untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dan optimalisasi operasional guna memastikan keberlanjutan usaha. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah menurunkan biaya operasional melalui efisiensi proses, memperkuat portofolio pembiayaan inti yang lebih stabil, serta mengevaluasi kembali sumber pendapatan yang selama ini tidak dapat diandalkan.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, kerugian berkelanjutan yang dialami oleh BPRS Cilegon Mandiri berpotensi mengurangi kapasitas permodalan di masa depan, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, strategi perbaikan menyeluruh perlu diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan rentabilitas dan meningkatkan daya tahan bank di masa yang akan datang.

Rentabilitas BPRS Harta Insan Karimah (BPRS HIK)

BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) adalah salah satu institusi keuangan syariah yang berpusat di Jl. Hos Cokroaminoto No.17, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah,

Kota Tangerang, Provinsi Banten. Didirikan pada tahun 1993, BPRS ini telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade, dan per 31 Desember 2023, BPRS HIK mencatatkan total aset yang signifikan, yakni sebesar Rp 711,9 miliar. Dalam penilaian rentabilitas, data menunjukkan bahwa BPRS HIK menempati posisi yang cukup baik dengan peringkat akhir 2, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Rentabilitas BPRS Harta Insan Karimah

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	1.57	2	2
BOPO	88.57	2	
NI	9.00	2	

Peringkat rentabilitas akhir pada posisi 2 menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS HIK berada pada kategori yang “memadai.” Peringkat ini mengindikasikan bahwa BPRS HIK berhasil mencapai laba yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi target yang diharapkan, yang berpotensi mendukung pertumbuhan permodalan secara berkelanjutan. Ini berarti BPRS HIK menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari aktivitas inti bank, atau *core earnings*, yang stabil. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan inti mencerminkan kestabilan operasional yang tinggi, dengan pengelolaan aset dan pendapatan yang efisien.

Rasio ROA sebesar 1.57 menunjukkan bahwa BPRS HIK mampu mengoptimalkan asetnya untuk menciptakan laba yang cukup signifikan. Ini menjadi indikator bahwa bank telah menjalankan strategi aset yang produktif, dengan penggunaan aset yang efektif untuk mendukung profitabilitas. Selain itu, rasio BOPO yang berada pada angka 88.57 menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengelolaan biaya operasional, di mana biaya operasional tidak melebihi 90% dari pendapatan operasional yang dihasilkan. Efisiensi ini memberikan ruang yang cukup bagi bank untuk mempertahankan profitabilitas dan memperkuat ketahanan finansialnya.

Dengan Net Income (NI) sebesar 9.00, BPRS HIK menunjukkan bahwa tingkat laba bersih yang dihasilkan cukup tinggi. Ini mengindikasikan kemampuan bank dalam menjaga kestabilan keuangan serta kemampuannya dalam meningkatkan permodalan yang akan menopang keberlangsungan usaha. Prospek pertumbuhan laba bank ke depan juga cukup menjanjikan, karena didukung oleh pendapatan yang konsisten dari sumber-sumber utama. Hal ini menempatkan BPRS HIK dalam posisi yang baik untuk menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan di masa depan. Secara keseluruhan, BPRS Harta Insan Karimah memiliki fundamental keuangan yang kuat, didukung oleh manajemen biaya yang efisien dan stabilitas pendapatan dari *core earnings*. Bank ini memiliki potensi untuk meningkatkan laba dan memperluas permodalan, yang pada gilirannya akan mendukung ekspansi operasional dan layanan yang lebih luas bagi nasabah.

Rentabilitas BPRS Muamalah Cilegon

BPR Syariah Muamalah Cilegon adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada tahun 1994 dengan nama BPRS Baitu Muawanah. Pada Februari 2013, bank ini berubah nama menjadi BPRS Muamalah Cilegon dan beroperasi di bawah nama tersebut hingga saat ini, dengan kantor pusat yang berlokasi di Jl. Raya Merak KM 7, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan laporan neraca per 31 Desember 2023, BPRS Muamalah Cilegon mencatatkan total aset sebesar Rp 81,1 miliar, mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan institusi ini.

Penilaian rentabilitas BPRS Muamalah Cilegon berdasarkan indikator keuangan menempatkan bank ini pada peringkat akhir 1, yang menunjukkan kinerja rentabilitas yang sangat baik, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Rentabilitas BPRS Muamalah Cilegon

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	3.45	1	1
BOPO	71.78	1	
NI	12.24	1	

Peringkat akhir pada level 1 menandakan bahwa BPRS Muamalah Cilegon berada dalam kategori rentabilitas yang sangat memadai. Dengan ROA sebesar 3.45, bank ini menunjukkan tingkat pengembalian aset yang optimal, mengindikasikan bahwa BPRS Muamalah Cilegon telah memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba yang signifikan. Angka ini jauh melampaui standar kinerja yang diharapkan, menunjukkan bahwa manajemen bank memiliki strategi efektif dalam memaksimalkan penggunaan aset untuk keuntungan yang tinggi.

Selain itu, rasio BOPO sebesar 71.78 memperlihatkan efisiensi yang luar biasa dalam pengelolaan biaya operasional. Nilai ini menunjukkan bahwa BPRS Muamalah Cilegon mampu menjaga biaya operasional tetap rendah, yaitu di bawah 75% dari pendapatan operasional. Efisiensi operasional ini adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rentabilitas yang tinggi, memungkinkan bank mempertahankan keuntungan secara konsisten tanpa dibebani oleh biaya yang besar.

Net Income (NI) sebesar 12.24 mengindikasikan tingkat laba bersih yang tinggi, yang menjadi salah satu indikator utama kestabilan finansial dan potensi pertumbuhan permodalan di masa depan. Kinerja laba bersih yang kuat ini memperkuat posisi BPRS Muamalah Cilegon sebagai lembaga yang memiliki ketahanan keuangan yang solid dan kemampuan untuk terus meningkatkan permodalan.

Sumber utama dari rentabilitas BPRS Muamalah Cilegon adalah *core earnings* yang sangat dominan dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan utama bank berasal dari kegiatan operasional inti yang memiliki prospek yang solid dan tidak bergantung pada pendapatan tambahan atau noncore earnings yang fluktuatif. Dominasi pendapatan utama ini tidak hanya meningkatkan prediktabilitas keuangan bank tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dapat dilihat bahwa BPRS Muamalah Cilegon menunjukkan performa yang luar biasa dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dan manajemen operasional yang efisien. Bank ini tidak hanya mampu memenuhi target laba, tetapi juga berada pada posisi untuk mendukung peningkatan permodalan yang berkelanjutan, menjadikan BPRS Muamalah Cilegon sebagai lembaga keuangan yang sangat prospektif di sektor pembiayaan syariah. Keunggulan ini memberikan optimisme bahwa bank ini akan terus memperkuat posisinya di pasar dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya.

Rentabilitas BPRS Mulia Berkah Abadi (BPRS Mulia)

BPR Syariah Mulia Berkah Abadi, yang sebelumnya bernama BPRS Risalah Ummat, telah beroperasi sejak tahun 1995 dan mengalami pergantian nama menjadi BPRS Mulia Berkah Abadi pada tahun 2010. Saat ini, kantor pusat BPRS MBA berada di Jalan Ceger Raya No.2CA, Kelurahan Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, BPRS MBA mencatat total aset sebesar Rp 212,8 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan peran penting dalam sektor perbankan syariah di kawasan tersebut. Penilaian rentabilitas BPRS MBA ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Rentabilitas BPRS Mulia

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	1.07	3	3
BOPO	86.44	2	
NI	3.66	5	

Nilai akhir pada peringkat 3 menunjukkan bahwa kinerja rentabilitas BPRS MBA berada dalam kategori "cukup memadai." Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai indikator keuangan BPRS MBA berdasarkan tabel di atas. *Pertama*, *Return on Assets* (ROA) sebesar 1.07: Rasio ini mengindikasikan bahwa BPRS MBA memiliki pengembalian atas aset yang cukup baik. Walaupun nilai ini menunjukkan kemampuan yang memadai dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki, angka ini masih dapat ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang optimal. ROA sebesar 1.07 menempatkan BPRS MBA pada peringkat 3, yang artinya rentabilitas bank ini mampu memenuhi target, namun perlu diperhatikan bahwa terdapat tekanan terhadap laba yang dapat menurunkan profitabilitas jika tidak dikelola dengan efektif.

Kedua, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 86.44: Rasio BOPO pada BPRS MBA menunjukkan bahwa biaya operasional telah mencapai 86.44% dari pendapatan operasional. Nilai ini mencerminkan bahwa bank masih memiliki efisiensi yang cukup baik dalam mengelola pengeluarannya, dan berada pada peringkat 2. Rasio BOPO yang rendah ini mengindikasikan bahwa BPRS MBA mampu mengelola biaya dengan cukup baik, sehingga tekanan terhadap rentabilitas dapat dikurangi dan laba dapat dipertahankan.

Ketiga, *Net Income* (NI) sebesar 3.66: Net income dengan peringkat 5 menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh relatif kecil dan masih memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa laba bersih yang rendah dapat menghambat laju pertumbuhan permodalan bank dan pengembangan bisnis di masa depan. Dalam konteks ini, bank perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas agar pendapatan dari core earnings atau sumber utama dapat lebih mendominasi dan tidak bergantung pada pendapatan tambahan (*noncore earnings*) yang fluktuatif.

Meskipun BPRS MBA memiliki kinerja laba yang cukup memadai, namun komposisi rentabilitasnya menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar dari *noncore earnings*. Sumber utama laba berasal dari core earnings yang stabil, namun belum cukup dominan, sehingga bank masih memiliki peluang untuk memperkuat aspek operasional inti. Stabilitas komponen yang mendukung core earnings cukup kuat dan mencerminkan prospek laba yang dapat diandalkan di masa mendatang, dengan kemungkinan yang baik untuk peningkatan permodalan.

Secara keseluruhan, meskipun BPRS MBA memiliki rentabilitas yang cukup memadai, terdapat tantangan dalam hal laba bersih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal dan mendukung ekspansi modal secara berkelanjutan. Manajemen perlu mempertimbangkan peningkatan strategi efisiensi dan diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada *noncore earnings*, serta memperkuat sumber utama pendapatan agar bank tetap kompetitif di masa yang akan datang.

Rentabilitas BPRS Musyarakah Ummat Indonesia (BPRS Mustindo)

BPR Syariah Musyarakah Ummat Indonesia (BPRS Mustindo), yang berdiri sejak tahun 2004, berkantor pusat di Jalan KH Hasyim Ashari No. 8, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, BPRS Mustindo memiliki aset sebesar Rp 59,1 miliar. Sebagai salah satu pemain di sektor perbankan syariah di Banten, BPRS Mustindo terus mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Berikut adalah penilaian kinerja rentabilitas BPRS Mustindo berdasarkan tabel berikut:

Tabel 9. Rasio Rentabilitas BPRS Mustindo

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	-1.09	5	3
BOPO	93.80	3	
NI	9.93	2	

Peringkat nilai akhir pada level 3 menunjukkan bahwa kinerja rentabilitas BPRS Mustindo dinilai cukup memadai, meskipun ada beberapa tekanan dalam menghasilkan laba yang berpotensi menghambat pertumbuhan di masa mendatang. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai indikator keuangan BPRS Mustindo. *Pertama*, *Return on Assets* (ROA) sebesar -1.09: ROA yang negatif menunjukkan bahwa BPRS Mustindo mengalami kerugian dari aset yang dimilikinya. Peringkat ROA berada pada level 5, yang menunjukkan bahwa kinerja laba masih perlu ditingkatkan. Rasio ini mengindikasikan bahwa laba yang dihasilkan saat ini tidak cukup untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan penggunaan aset bank, dan perlu dilakukan upaya signifikan dalam manajemen aset dan pengendalian biaya untuk memperbaiki posisi ini.

Kedua, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 93.80: Rasio BOPO yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan operasional BPRS Mustindo habis oleh biaya operasional, yang berpotensi mengurangi efisiensi bank dalam menghasilkan laba. Nilai BOPO pada peringkat 3 menunjukkan bahwa bank masih mampu menekan biaya, tetapi secara keseluruhan efisiensinya masih memerlukan perbaikan. Mengurangi BOPO akan membantu meningkatkan laba dan membuat bank lebih kompetitif di tengah persaingan pasar perbankan syariah.

Ketiga, *Net Income* (NI) sebesar 9.93. Peringkat laba bersih pada level 2 menunjukkan hasil yang cukup baik dari sisi pendapatan bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS Mustindo memiliki komponen laba yang stabil dan cukup dapat diandalkan sebagai sumber utama rentabilitasnya. Namun, pengaruh dari noncore earnings juga signifikan, yang berarti pendapatan utama (*core earnings*) belum sepenuhnya dominan. Hal ini memberikan ruang bagi bank untuk lebih memperkuat *core earnings* guna mencapai kinerja yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, BPRS Mustindo dapat dikatakan memiliki rentabilitas yang cukup memadai, meskipun terdapat beberapa faktor yang memengaruhi profitabilitas, khususnya tekanan dari biaya operasional yang tinggi serta ketergantungan pada sumber pendapatan noncore. Sumber utama rentabilitas BPRS Mustindo masih cukup dominan pada *core earnings*, yang artinya pendapatan dari kegiatan utama bank dapat diandalkan. Namun, pengaruh signifikan dari noncore earnings menunjukkan perlunya upaya dalam memperkuat kegiatan utama agar lebih stabil dalam jangka panjang.

BPRS Mustindo perlu memprioritaskan strategi peningkatan efisiensi biaya untuk mengurangi rasio BOPO serta berupaya memaksimalkan potensi *core earnings* untuk mendukung pertumbuhan permodalan. Meskipun tantangan ada, prospek laba di masa depan masih cukup baik dengan dukungan yang kuat dari pendapatan bersih dan strategi peningkatan kinerja operasional. Upaya ini dapat memastikan bahwa bank tidak hanya mampu menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga menjadi lebih kompetitif di pasar perbankan syariah di Banten.

Rentabilitas BPRS Wakalumi

BPR Syariah Wakalumi merupakan singkatan dari wakaf karyawan alumni citibank, berdiri sejak tahun 1990 dengan sistem perbankan konvensional dan merubah sistem operasionalnya menjadi syariah atau menjadi BPRS sejak tahun 1995, berkantor pusat di Jl Dewi Sartika Komplek Ciputat Mutiara Center Blok B1, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten saat ini memiliki aset sebesar Rp 26,1 Miliar (Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2023).

Tabel 10. Rasio Rentabilitas BPRS Wakalumi

Rasio Rentabilitas	Nilai	Peringkat	Nilai Akhir
ROA	-0.04	5	2
BOPO	78.19	1	
NI	17.76	1	

Berdasarkan data diatas BPRS Wakalumi memiliki nilai akhir peringkat 2 (dua) artinya secara rentabilitas BPRS Wakalumi dianggap memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan, hal ini dapat diartikan juga bahwa BPRS Attaqwa dapat memenuhi atau sebagian besar dari karakteristik Kinerja dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai, Sumber utama rentabilitas didominasi dari *core earnings* (penghasilan utama) yang stabil dan /atau BPRS Wakalumi dianggap memiliki kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.

Tabel 11. Nilai Rasio Rentabilitas BPRS Wilayah Banten

No	Nama BPRS	Nilai	Rentabilitas
1	BPRS Attaqwa	2	Memadai
2	BPRS Berkah Ramadhan	5	Tidak Memadai
3	BPRS Cilegon Mandiri	5	Tidak Memadai
4	BPRS Harta Insan Karimah	2	Memadai
5	BPRS Muamalah Cilegon	1	Sangat Memadai
6	BPRS Mulia Berkah Abadi	3	Cukup Memadai
7	BPRS Mustindo	3	Cukup Memadai
8	BPRS Wakalumi	2	Memadai
Nilai rata-rata Rentabilitas		3	Cukup Memadai

Jika dibuat rata-rata nilai dari 8 BPRS adalah 3 (tiga) artinya secara keseluruhan berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai rentabilitas BPRS wilayah banten pasca pandemi covid-19 masih cukup memadai dengan kata lain sumber utama rentabilitas BPRS wilyah Banten yang berasal dari *core earnings* cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari *noncore earnings* dan komponen yang mendukung *core earnings* cukup stabil dan/atau kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik. Namun perlu menjadi catatan khusus untuk BPR Syariah Berkah Ramadhan dan Cilegon Mandiri untuk meningkatkan kinerja pembiayaan dan efisiensi biaya agar rentabilitas dapat ditingkatkan nilainya.

Tabel 12. Persentase Rasio Rentabilitas BPRS Wilayah Banten

Peringkat	Rentabilitas	Jumlah BPRS	Persentase
1	Sangat Memadai	1	12,5%
2	Memadai	3	37,5%
3	Cukup Memadai	2	25,0%
4	Kurang Memadai	0	0,0%
5	Tidak Memadai	2	25,0%

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data rentabilitas terhadap laporan yang dikirim BPR Syariah Wilayah Banten per 31 Desember 2024 (pasca Pandemi Covid-19) pada laman resmi OJK menunjukkan bahwa rentabilitas BPRS Wilayah Banten bervariasi dengan persentase 37,5% memadai, 25% Cukup Memadai, 25% tidak Memadai dan 12,5% sangat memadai. Dari 8 BPR Syariah hanya 2 yang memiliki nilai tidak memadai (12,5%) hal ini menunjukkan bahwa setelah pandemi covid-19 secara keseluruhan BPR Syariah di Wilayah Banten untuk nilai rentabilitasnya masih dapat diandalkan untuk *mengcreate* laba (memadai) dan berpotensi meningkatkan modal pada masa yang akan datang. Dari penelitian ini juga terdapat 2 (dua) BPR Syariah yakni BPRS Syariah Mustindo dan Cilegon Mandiri agar meningkatkan kinerja pendapatan utamanya dari penyaluran dana dan mengefisienkan biaya operasionalnya guna meningkatkan rentabilitas.

References

- Arfaizar, J., Gustanto, E. G., Fikri, M (2024). Contemporary Dynamics in Islamic Banking Transactions. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i1.7>
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., YUSDANI, Muliadi, S. (2023). Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital di Indonesia. *Wadiah*, 7(2). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group
- Firdaus. (2021). Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat, TBK Tahun Periode 2015-2019. *Jurnal Proaksi*, Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1675>
- Kadir, R. D., & Rahman, S. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia. *Akasyah: Journal of Islamic Accounting*, 1(2), 16–23. <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/akasyah>
- Kartiko, C. (2018). *Bisnis Model Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. CV Spirit Komunika
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers
- Kasmir. (2018). *Pemasaran Bank*. Kencana
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. (2012); *Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Press Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan (2024) Laporan Publikasi BPR Syariah diakses pada 04 Maret 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan>
- Pradifita, H. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta
- Peraturan Bank Indonesia. (2007). PBI nomor 9/17/PBI/2007 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2019). POJK nomor 20 /POJK.03/2019 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2022). POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang *Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Ridwan, R., Zamzami, Z., & Yudi, Y. 2021. Pengaruh Risiko Pembiayaan, Tingkat Kecukupan Modal Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jaku (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 6(4), 253-266. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16368>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (2022). SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. (1997). SK Dir BI Nomor 30/12/KEP/DIR tentang *Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat*.
- Suryani & Hendriyati. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenadamedia.
- Tiono, I. & Djaddang, S. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pada Perbankan Konvensional Buku IV Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 18(1). <https://doi.org/10.25170/balance.v18i1.2336>
- Thamrin, H. 2021. Analisis dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Tua, R. B. & Nurlita, E.. 2021. Kualitas ROA BPR di Indonesia pada Masa COVID-19 Sebagai

- Akibat Kualitas Kredit (NPL) yang Naik serta Penambahan Biaya Operasional (BOPO).
Jurnal Buana Akuntansi, 6(2). <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i2.1755>
- Wirnawati, M., & Diyani, L. A. (2019). Pengujian CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 4(1), 69-80.
- Zainul Arifin. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.